



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Juli 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MANEGER NASUTION
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 686299

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.711.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.766.000.000
2. Tanah Seluas 6.312 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 17.884 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 830.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G.AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B67 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2,8 VRZ AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.457.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.000.928

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.024.500.928



III. HUTANG

Rp. 459.960.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.564.540.928

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.